



Biaya Retret Kepala Daerah Ditanggung Kemendagri

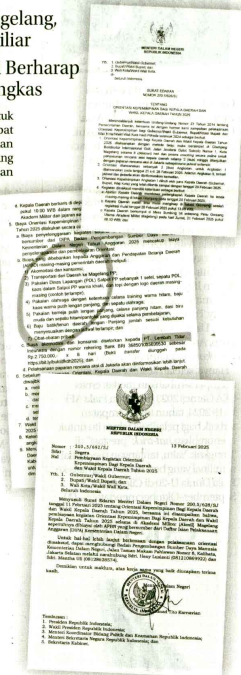
- Menginap 8 Hari di Magelang, Bisa Habiskan Rp 22 Miliar
- Akademisi dan Peneliti Berharap Dana Riset Tidak Dipangkas

JAKARTA - Konsistensi pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran mendapat sorotan. Gara-garanya, pemerintah akan menggelar pembekalan kepala daerah yang berpotensi menghabiskan dana puluhan miliar rupiah. *Baca Biaya... Hal 11*



Pembekalan kepala daerah bukan hal baru. Hanya, konsepnya kali ini berbeda. Ini Kemendagri dan Lemhanas jadi satu. Supaya efektif, efisien."

JURI ARDIANTORO
Wakil Menteri Sekretaris Negara



Biaya Retret Kepala Daerah Ditanggung Kemendagri

Sambungan dari hal 1

Berdasar draf Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ, terdapat 505 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang akan menjalani retreat. Lokasinya berada di Glamping Borobudur International Golf, Magelang. Acara tersebut dilaksanakan selama delapan hari, 21–28 Februari 2025.

Selama bermalam di Magelang, kepala daerah diwajibkan menanggung biaya akomodasi Rp 2.750.000 per hari. Jika dikalikan delapan hari, total biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp 22

juta per orang.

Nah, jika diasumsikan peserta hanya kepala daerah sebanyak 505 orang, biaya yang dihabiskan sekitar Rp 11,1 miliar. Namun, jika wakil kepala daerah juga diwajibkan ikut, biayanya akan dua kali lipat atau sekitar Rp 22,2 miliar.

Jumlah itu belum termasuk akomodasi dari daerah serta kebutuhan untuk staf maupun ajudan masing-masing. Pada mulanya, anggaran tersebut dibebankan pada APBD. Namun, tadi malam Mendagri mengeluarkan SE 200.5/692/SJ. Secara garis besar, surat itu menyatakan bahwa semua kegiatan akan dibiayai APBN.

Saat dikonfirmasi *Jawa Pos*, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang selama ini meng-handle kegiatan tersebut belum mau berkomentar. Sementara itu, Plt Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Aang Witasara hanya menjawab singkat. "Iya benar (ada SE baru)," ujarnya tadi malam.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebutkan, retreat kepala daerah adalah kegiatan yang strategis sehingga tetap perlu dilakukan meski dalam kondisi efisiensi. "Retret itu bagian dari program yang penting," ujarnya.

Soal detail anggarannya,

Juri mengaku tidak tahu karena dipegang Kemendagri. Dia yakin pelaksanaannya tetap memperhatikan efektivitas. Terkait sumbernya, dia menduga akan berasal dari APBN melalui DIPA Kemendagri. Juri menjelaskan, pembekalan kepala daerah bukan hal baru. Hanya, konsepnya kali ini berbeda dengan sebelumnya yang digelar di Lemhannas. "Ini kementerian dalam negeri dan Lemhannas jadi satu supaya efektif, efisien," kata mantan ketua KPU itu.

Tidak Konsisten

Pengamat kebijakan publik

Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam isu efisiensi. Menurut dia, pembekalan yang menghabiskan puluhan miliar rupiah tidak sejalan dengan narasi penghematan.

"Seharusnya pemerintah itu konsisten. Itu aja deh. Kalau memang mau efisiensi, ya efisiensi," ujarnya.

Lina sejak awal melihat kebijakan efisiensi pemerintah tidak konsisten. Dia mencontohkan, dalam pemangkas anggaran, ada lembaga-lembaga yang dikesialkan, misalnya DPR.

Kebijakan efisiensi anggaran menjadi sorotan kalangan dosen di perguruan tinggi negeri. Khususnya dosen-dosen yang mengampu urusan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Ketua Asosiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) PTNBH Yuli Setyo Indarto berharap anggaran riset dan pengabdian masyarakat tidak dipotong. "Bahkan usulan kami, anggaran riset ditambah," katanya di sela peluncuran Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) 2025 di kampus Universitas Terbuka (UT) Tangerang Selatan, Banten, kemarin.

Yuli mencontohkan, anggaran Kemendiknas yang rencananya dipangkas Rp 22,2 triliun. Dia khawatir penggeprasan yang begitu besar justru mengancam target untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Menurut dia, target tersebut sudah semakin dekat, yaitu 20 tahun lagi. Bagi dia, bidang pendidikan dan riset menjadi

pilar penting untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, pembahasan efisiensi anggaran terus dilakukan kementerian/ lembaga dengan mitra di Komisi DPR kemarin. Salah satunya, Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan di Kemenkeu adalah konsumsi atau makanan di berbagai rapat telah dihilangkan.

"Yang kita optimalkan dan efisienkan adalah berbagai belanja operasional seperti konsinyering, kegiatan seremonial kita hapuskan seluruhnya. Bahkan, pengadaan suvenir, pencetakan banner, spanduk, dan konsumsi untuk rapat tidak ada lagi," ujarnya kemarin. (far/wan/dee/c7/oni)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005